



► PENATAAN LEMPUYANGAN

Warga Berharap Pengosongan Mundur

DANUREJAN—Setelah sebelumnya menolak, warga Tegal Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, akhirnya menerima rencana penataan yang bakal dilakukan oleh PT KAI. Meski demikian, warga berharap pengosongan lahan bisa diundur sampai Agustus 2025.

Ariq Fajar Hidayat
redaksi@harianjogja.com

Kesepakatan itu disampaikan juru bicara warga, Antonius Fokki Ardiyanto, setelah menggelar pertemuan dengan KAI Daop 6 di kantornya, Selasa (17/6) sore. Sebelumnya, PT KAI melayangkan surat peringatan ketiga (SP3) kepada warga Tegal Lempuyangan untuk segera mengosongkan bangunan yang berdiri di atas lahan yang dikelola PT KAI. SP tersebut telah dikirimkan pada Kamis (12/6). Dalam surat itu, warga diminta mengosongkan bangunan paling lambat tujuh hari setelah SP3 diterima.

Meskipun telah menerima, warga meminta agar penataan ditunda sementara, setidaknya hingga Agustus 2025. Fokki mengatakan, warga berkeinginan bisa merayakan

- Warga Tegal Lempuyangan meminta agar penataan ditunda sementara, setidaknya hingga Agustus 2025.
- Kraton diharapkan memberikan dukungan lebih kepada warga yang terdampak.

HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Namun, keinginan tersebut masih belum mendapat persetujuan dari PT KAI dan masih akan didiskusikan lagi. "Warga minta waktu untuk bisa merayakan Agustusan [HUT Kemerdekaan RI] bersama untuk yang terakhir kalinya di Lempuyangan. Setelah itu terserah. Kalau dirasa perlu dilakukan [penertiban] oleh PT KAI, silakan," ujar Fokki saat ditemui se usai menggelar audiensi di Kantor Daop 6, Selasa sore.

Terkait dengan kompensasi, Fokki mengungkapkan warga meminta adanya pengukuran ulang. Hanya saja, teknis pengukuran masih perlu didiskusikan lagi dengan PT KAI.

Lebih lanjut, warga juga meminta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memberikan dukungan lebih kepada masyarakat yang terdampak penataan. Disebutnya, saat ini Kraton menawarkan *bebungah* sebesar Rp53 juta untuk setiap rumah.

"Misalkan Rp53 juta itu kemudian ditambah rata-rata kompensasi dari KAI sebesar Rp50 juta. Pertanyaan lanjutannya, apakah kompensasi itu bisa memenuhi hak konstitusi warga negara untuk bertempat tinggal," kata Fokki.

Manager Humas KAI Daop 6, Feni Novida Saragih, mengatakan akan mempertimbangkan permintaan warga agar penataan dilakukan setelah bulan Agustus. Meski demikian, PT KAI tetap berpedoman bahwa penataan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam SP3. "Kami akan mengusulkan, tetapi kami tetap sesuai dengan prosedur penertiban, yakni akan dilakukan setelah tenggat waktu dalam SP3 habis," kata Feni.

Mengenai kompensasi, Feni menyebut tidak akan mengubah angka yang sudah disebutkan sebelumnya. Menurutnya, angka kompensasi tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Terkait dengan rencana penataan kawasan Lempuyangan, Feni menyebut bahwa kapasitas Stasiun Lempuyangan saat ini kurang memenuhi kebutuhan pelanggan yang besar. Karena itulah, kapasitas stasiun perlu ditambah dengan penataan di kawasan sekitar. "Stasiun Lempuyangan saat ini melayani hampir 15.000 pelanggan per hari, sehingga butuh kapasitas yang lebih besar untuk bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, maka perlu ada penataan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005